



GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN
NOMOR 188.44/0488/KUM/2016
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan keberhasilan visi, misi organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dalam upaya mewujudkan *Good Governance*, telah ditetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. bahwa sesuai dengan dinamika dan perkembangan yang terjadi, Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0549/KUM/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dipandang perlu untuk disempurnakan sesuai RPJMD 2016-2021 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 44);

14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor .. Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 Nomor);
16. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 060 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 60);
17. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 090 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 90)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Gubernur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang ditetapkan melalui indikator kinerja yang memberikan penjelasan baik sebagai acuan kuantitatif maupun kualitatif mengenai apa yang dilakukan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai;
 - b. sebagai acuan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Unit Kerja, Unit Kerja Mandiri, dalam menentukan kinerja utama yang akan diwujudkan; dan
 - c. untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis rencana pembangunan daerah dan SKPD yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan akuntabilitas kinerja.

- KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0549/KUM/2012 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN



H. SAHBIRIN NOOR

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta.
2. Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
4. Seluruh Pimpinan SKPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin/Banjarbaru/Jakarta.

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJUA UTAMA	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka melek huruf • Angka rata-rata lama sekolah • Angka Partisipasi Murni SD/MI • APK SLTP/MTs • APK SLTA/MA/MK 	<p><u>Makna Indikator :</u> Maksud dari Indikator disini adalah meningkatnya mutu pendidikan dapat dicapai dengan perbaikan diberbagai bidang.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur baik buruknya kualitas peningkatan dibidang pendidikan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • • Jumlah Penduduk x Lama Pendidikan yang dihabiskan dibanding Jumlah Penduduk 15 keatas yang sedang Sekolah/telah berijazah • Perbandingan antara <i>jumlah penduduk kelompok usia sekolah</i> pada jenjang pendidikan SD/MI dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persen • Perbandingan antara <i>jumlah siswa</i> pada jenjang pendidikan SMP/MTs dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persen • Perbandingan antara <i>jumlah siswa</i> pada jenjang pendidikan SM dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persen 	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Angka Kematian Ibu/1.000 KH • Angka Kematian Bayi/100.000 KH • AKABA 	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator tersebut mencerminkan baik buruknya kualitas pelayanan kesehatan</p>	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan dan BPS

		<ul style="list-style-type: none"> Balita Gizi Buruk Balita Gizi Kurang 	<p>terhadap masyarakat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan tolak ukur baik buruknya kualitas pelayanan tenaga kesehatan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> kematian ibu dapat diubah menjadi rasio kematian ibu dan dinyatakan per 100.000 kelahiran hidup, dengan membagi angka kematian dengan angka fertilitas umum. Dengan cara ini diperoleh rasio kematian ibu kematian maternal per 100.000 kelahiran. Jumlah kematian bayi di satu wilayah selama satu tahun di bagi jumlah kelahiran hidup pada tahun yang sama X 1.000. Banyaknya penduduk yang meninggal pada usia kurang dari 5 tahun dibagi Banyaknya Balita dikalikan 100% Banyaknya Balita Gizi Buruk dibagi Jumlah Balita dikali 100% Banyaknya Balita Kurang Gizi dibagi Jumlah Balita dikali 100% 		
3	Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga Kerja	Angka Partisipasi Angkatan Kerja	<p><u>Makna Indikator :</u> Angka Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. APAK adalah indikator yang biasa digunakan untuk menganalisa partisipasi angkatan kerja.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya indikator tersebut dapat dijadikan alat deteksi Pemerintah dalam pengurangan tingkat pengangguran di Provinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini kerja sama antara Pemerintah dalam pembentukan regulasi, swasta dalam pembukaan lapangan pekerjaan serta</p>	Dinas Tenaga Kerja	SKPD Terkait dan BPS

			<p>masyarakat, sangat di tuntut.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <p>$\frac{\text{Jumlah Angkatan Kerja}}{\text{Jumlah Penduduk Usia Kerja}} \times 100\%$</p>		
4	Meningkatnya Pemahaman Keagamaan	Persentasi Lulusan SMA/MA yang beragama Islam Khatam Al-Quran	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator Persentasi Lulusan SMA/MA yang beragama Islam Khatam Al-Quran adalah indikator persentase jumlah siswa SMA/MA yang beragama muslim yang khatam Alquran dibandingkan dengan Lulusan SMA/MA beragama islam secara total</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator disini diharapkan dapat menggambarkan generasi muda dengan tingkat pemahaman keagamaan yang memadai.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> jumlah siswa SMA/MA yang beragama muslim yang khatam Alquran : Lulusan SMA/MA beragama islam secara total dikali 100%.</p>	Dinas Pendidikan	Dinas Pendidikan
5	Meningkatnya Indeks Pembangunan Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian • Unmeed Need 	<p><u>Makna Indikator :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian adalah indikator yang mengukur seberapa banyak Partisipasi Perempuan di pekerjaan non pertanian, • Unmeed Need didefinisikan sebagai kelompok wanita yang sebenarnya sudah tidak ingin mempunyai anak lagi atau ingin menjarangkan kehamilannya sampai dengan 24 Bulan namun tidak menggunakan alat kontrasepsi untuk mencegah kehamilan 	BPPPA	BPPPA dan BPS

			<p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator disini menggambarkan semakin banyak Partisipasi Perempuan di Pekerjaan Non Pertanian dianggap semakin setara • Untuk Unmeed Need menggambarkan tingkat distribusi Pengetahuan, Kualitas layanan terhadap pemilihan alat kontrasepsi, pemahaman efek samping yang ditimbulkan oleh masing-masing metode kontrasepsi dan hubungan antara wanita dan provider kepada Perempuan. <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Survey • Survey 		
6	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator Indeks Kepuasan Masyarakat adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan pemerintah.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dalam rangka Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan kualitas aparatur di daerah, melalui penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan Publik yang terbaik bagi masyarakat dan untuk meningkatkan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan aparatur di daerah, Peningkatan kesejahteraan aparatur dan keluarga melalui perbaikan tunjangan dan diharapkan berdampak positif terhadap kinerja aparatur.</p>	Biro Organisasi, Seluruh Unit Pelayanan Publik	Biro Organisasi, Seluruh Unit Pelayanan Publik

			<p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Survey 		
7	Meningkatnya Pendanaan Daerah	Rasio Kemandirian Daerah (PAD/APBD)	<p><u>Makna Indikator :</u> Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan penda dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangaunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Rasio kemandirian menggambarkan ketergantunagn daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi rasio kemandirian mangandung artio bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuah pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provensi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejatraan masyarakat yang semakin tinggi</p>	Dispenda dan Biro Keuangan	Dispenda dan Biro Keuangan

			<p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <p>$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Transfer pusat + propinsi + pinjaman}} \times 100\%$</p>		
8	Meningkatnya Kinerja Pembangunan Daerah	Tercapainya Sasaran Pembangunan Jangka Menengah		Bappeda	Bappeda
9	Terwujudnya Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK • LAKIP 	<p><u>Makna Indikator :</u> dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan melalui peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan kualitas aparatur di daerah, melalui penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Keuangan BPK • Nilai Evaluasi 	Biro Keuangan Biro Organisasi	Biro Keuangan Biro Organisasi
10	Menurunnya penyandang masalah kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	<p><u>Makna dari indikator:</u></p> <p>Makna Indikator tersebut kita mengharapkan dengan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial di Kalimantan selatan baik itu dari segi pembinaan secara materil dan moril dapat mewujudkan Daerah yang memiliki Kualitas yang baik di bidang sosial sehingga kesenjangan sosial dapat</p>	Dinas Sosial	Dinas Sosial

			<p>teratasi dan dapat berpengaruh baik dalam menciptakan iklim yang kondusif</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dengan adanya indikator tersebut kita harapkan dapat memacu terjadinya peningkatan di bidang kehidupan sosial bermasyarakat dengan ditandai dengan menurunnya angka kemiskinan, menurunnya Remaja keluarga Fakir Miskin Penyandang Masalah Sosial, tersedia dan bertambahnya Sarana dan Prasarana pada daerah kantong-kantong kemiskinan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah PMKS yang diberi bantuan dibandingkan dengan PMKS yang seharusnya diberi bantuan di kali 100%</p>		
11	Meningkatnya Ketentraman, Ketertiban, perlindungan masyarakat	Persentase Penanganan Konflik Sosial yang diselesaikan di Kalsel	<p><u>Makna dari indikator:</u> Makna Indikator tersebut kita harapkan dengan Meningkatkan Kualitas Kehidupan Sosial di Kalimantan selatan baik itu dari segi pembinaan secara materil dan moril dapat mewujudkan Daerah yang memiliki Kualitas yang baik di bidang sosial sehingga kesenjangan sosial dapat teratasi dan dapat berpengaruh baik dalam menciptakan iklim yang kondusif</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Semakin sedikit Kasus/konflik yang terjadi, semakin tinggi tingkat keamanan, ketentraman, dan ketertiban dibandingkan dengan sebelumnya</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Jumlah Kasus yang ditangani : Jumlah kasus yang terjadi dikali 100%</p>	Kesbangpol	Kesbangpol
12	Terselenggaranya PON	Terbangunnya sport center			

13	Meningkatnya Etos Kerja, Moralitas, Sikap, Disiplin, Kreatifitas, dan Kepedulian	Perubahan perilaku menuju positif	<u>Rumus Perhitungan :</u> Survey	BKD, Biro Organisasi	Seluruh SKPD
14	Meningkatnya Kerukunan Antar dan Inter Umat Beragama	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Pengaduan Gangguan melaksanakan Kegiatan Keagamaan yang ditindaklanjuti • Persentase peningkatan lembaga sosial keagamaan • Persentase peningkatan lembaga pendidikan keagamaan • Persentase kesepakatan hasil pertemuan antar umat beragama yang ditindaklanjuti 	<u>Makna Indikator :</u> Pemerintah Provinsi Kalimantan selatan selalu berusaha meningkatkan Kerukunan antar dan inter Umat beragama agar tercipta kehidupan yang damai dan berdampingan satu sama lain Alasan Pemilihan	Badan Kembangpol dan Biro Kesra	Badan Kembangpol dan Biro Kesra
15	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan ketahanan budaya • Meningkatkan Kualitas Budaya Masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Benda, Situs, dan Cagar Budaya yang dilestarikan • Persentase Ragam Seni Budaya yang hampir punah yang di aktualisasikan 	<u>Rumus Perhitungan :</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Benda Cagar budaya yang dilestarikan tahun berjalan dibandingkan dengan benda cagar budaya tahun sebelumnya dinyatakan dalam persen • 	Dipsorbudpar	Dipsorbudpar
16	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Dasar	Indeks Pelayanan Infrastruktur Dasar		Dinas PU	Dinas PU
17	Meningkatnya Kuantitas dan Kualitas Infrastruktur Perekonomian	Persentase Fasilitas Pembangunan Infrastruktur Strategis`		Dinas PU	Dinas PU
18	Terwujudnya Mandiri Pangan	Produksi : Beras Daging Ikan	<u>Makna dari indikator:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Dengan Meningkatnya Produksi Beras dapat menyediakan ketersediaan pangan, khususnya Kalimantan selatan bahkan juga daerah luar Kalsel • Dengan Meningkatnya Produksi Daging dapat menyediakan ketersediaan pangan, khususnya Kalimantan selatan bahkan juga daerah luar Kalsel • Dengan Meningkatnya Produksi Ikan 	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan	Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan

			<p>dapat menyediakan ketersediaan pangan selain Daging, khususnya Kalimantan selatan bahkan juga daerah luar Kalsel</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Pemenuhan Pangan pada daerah Kalimantan Selatan sehingga Kalsel mampu menjadi Daerah Mandiri Pangan dan bahkan dapat juga sebagai pemasok diluar Kalsel</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> Produksi : <ul style="list-style-type: none"> • Beras • Daging • Ikan </p>		
19	Meningkatnya Kontribusi sektor pertanian	LPE Pertanian**		Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
20	Meningkatnya Kontribusi Sektor Industri, Perdagangan dan Jasa	<ul style="list-style-type: none"> • LPE Industri** • LPE Perdagangan** • LPE Jasa** 	<p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi Industri diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) PDRB ADHK pada satu tahun dikurang PDRB ADHK pada tahun sebelumnya : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya dikali 100% • Laju Pertumbuhan Ekonomi Perdagangan diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) PDRB ADHK pada satu tahun dikurang PDRB ADHK pada tahun sebelumnya : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya dikali 100% • Laju Pertumbuhan Ekonomi Jasa diukur dengan menggunakan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) PDRB ADHK pada satu tahun 	Disperindag	Disperindag

			dikurang PDRB ADHK pada tahun sebelumnya : PDRB ADHK pada tahun sebelumnya dikali 100%		
21	Meningkatnya Kontribusi Sektor Pariwisata	LPE Sektor Pariwisata	BPS	Disporbudpar	BPS
22	Meningkatnya Nilai Investasi Dalam Aktivitas Perekonomian	Realisasi Nilai Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rupiah)		BKPMD	BKPMD
23	Menurunnya kerusakan dan pencemaran lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Tutupan Lahan • Indeks Kualitas Udara • Indeks Kualitas Air • Luas Genangan Banjir (ha) 	<p><u>Makna dari indikator:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indeks Tutupan Lahan adalah Indikator untuk menghitung Perbandingan antara Luas Tutupan berhutan dengan Luas Wilayah Provinsi. • Indeks Kualitas Udara adalah indikator yang digunakan untuk melakukan Pengukuran Kualitas udara yang dilakukan sebanyak empat kali per tahun yang dianggap mewakili kualitas udara tahunan untuk masing-masing parameter. • <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Hutan merupakan salah satu komponen yang penting dalam ekosistem. Selain berfungsi sebagai penjaga tata air, hutan juga mempunyai fungsi mencegah terjadinya erosi tanah, mengatur iklim, dan tempat tumbuhnya berbagai plasma nutfah yang sangat berharga bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 	BLHD	BLHD

Rumus Perhitungan :

$$ITH = \frac{LTH}{LWP}$$

Dimana :
ITH : Indeks Tutupan Hutan
LTH : Luas Tutupan Berhutan
LKH : Luas Wilayah Provinsi

$$IPU = \frac{IP_{NO_2} + IP_{SO_2}}{2}$$

Dimana :
IPU = Indeks Pencemaran Udara
 IP_{NO_2} = Indeks Pencemar NO_2
 IP_{SO_2} = Indeks Pencemar SO_2

$$PI_j = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_M^2 + (C_i/L_{ij})_R^2}{2}}$$

Dimana :
 $(C_i/L_{ij})_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
 $(C_i/L_{ij})_R$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij}
Evaluasi terhadap PI_j adalah sebagai berikut :
1. Memenuhi baku mutu atau kondisi baik jika $0 < PI_j < 1,0$
2. Tercemar ringan jika $1,0 < PI_j < 5,0$
3. Tercemar sedang jika $5,0 < PI_j < 10,0$
4. Tercemar berat jika $PI_j > 10,0$

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

**INDIKATOR TUJUAN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NO	TUJUAN PEMBANGUNAN	INDIKATOR TUJUAN	PENJELASAN (Makna Indikator, Alasan Pemilihan Indikator, Cara Perhitungan Indikator)	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatkan Daya Saing Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> • IPM 	<p><u>Makna Indikator :</u> IPM adalah Indeks yang dihasilkan dari beberapa komponen yaitu pencapaian aspek pendidikan, kesehatan dan daya beli masyarakat.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini untuk menggambarkan Tingkat Keberhasilan Pemerintah Provinsi Kalsel dalam meningkatkan Daya Saing SDM. <p><u>Rumus Perhitungan :</u> BPS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas kesehatan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan • Dinas kesehatan • Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi • BPS
2	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	<ul style="list-style-type: none"> • Opini BPK • Nilai SAKIP 	<p><u>Makna Indikator :</u> dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah melaksanakan kebijakan melalui peningkatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah, serta meningkatkan akuntabilitas, transparansi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Dalam rangka mewujudkan Aparatur Pemerintah yang Profesional dan Pemerintahan Akuntabel Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terus melakukan peningkatan kualitas aparatur di daerah, melalui penataan dan peningkatan kapasitas aparatur, agar lebih</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Keuangan • Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi dan seluruh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Biro Keuangan • Bappeda, Inspektorat, Biro Organisasi dan seluruh SKPD

			<p>profesional, sesuai dengan tugas dan fungsinya</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nilai Evaluasi Keuangan BPK • Nilai Evaluasi 		
3	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Indeks Gini	<p><u>Makna dari indikator:</u> Makna Indikator tersebut Indeks yang mencerminkan Pemerataan Pendapatan Masyarakat</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indeks yang menggambarkan tingkat kesenjangan Pendapatan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u> BPS</p>	Dinas Sosial	Dinas Sosial
4	Meningkatkan kualitas kehidupan yang berbasis kearifan lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Persentase Kejadian Konflik antar suku, agama. • Persentase Penurunan Angka Kriminalitas 	<p><u>Makna Indikator :</u> Indikator disini merupakan Usaha Pemerintah Provinsi dalam menciptakan Kehidupan yang kondusif dan kekeluargaan.</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indikator ini mencerminkan Kualitas Kehidupan yang berbasis kearifan lokal</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. • Disporbudpar • seluruh SKPD 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan. • Disporbudpar
5	Meningkatkan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks Pemerataan Pembangunan Wilayah Antar Kabupaten Kota di Kalsel • Persentase Ketaatan Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah 	<p><u>Makna Indikator :</u></p> <p>Menggambarkan aspek keadilan terhadap pembangunan antar wilayah sehingga terjadi pemerataan Pembangunan</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator ini mencerminkan aspek keadilan penyediaan dan pemerataan pembangunan infrastruktur ke seluruh wilayah sesuai dengan tata ruang. • Persentase Ketaatan Terhadap Perda Tata Ruang Wilayah sangat penting karena ketaatan terhadap perda tata ruang nya pelaksanaan pembangunan sehingga tertata dan terlaksana dan 	<ul style="list-style-type: none"> • Dinas Pekerjaan Umum • seluruh SKPD 	Dinas Pekerjaan Umum

			<p>menjamin keberlanjutan pembangunan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> $IW = \frac{1}{\bar{y}} \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \frac{P_i}{P}}$ <p>IW = Indeks Williamson <i>y_i</i> = PDRB per kapita kabupaten/kota <i>y'</i> = Rata-rata PDRB per kapita Provinsi <i>P_i</i> = Jumlah penduduk kabupaten/kota <i>iP</i> = Jumlah penduduk Provinsi</p>		
6	Meningkatkan daya saing Perekonomian	<ul style="list-style-type: none"> • Laju Pertumbuhan Ekonomi • Laju Inflasi 	<p><u>Makna Indikator :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Laju Perkembangan Ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat • Laju Inflasi adalah proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai secara kontinu <p><u>Alasan Pemilihan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Indikator LPE dapat menggambarkan seberapa besar Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Selatan. • Laju Inflasi adalah indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung 	Disperindag dan Biro Ekonomi dan seluruh SKPD	BPS

			<p>secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi di Kalimantan selatan</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • BPS • BPS 		
7	Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	<p><u>Makna Indikator :</u> Mengukur kualitas lingkungan umumnya dilakukan secara parsial berdasarkan media, yaitu air, udara, dan lahan sehingga sulit untuk menilai apakah kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah bertambah baik atau sebaliknya. Salah satu cara untuk mereduksi banyak data dan informasi adalah dengan menggunakan indeks</p> <p><u>Alasan Pemilihan :</u> Indeks Kualitas Lingkungan Hidup mampu menggambarkan Kualitas Lingkungan Hidup di Kalimantan selatan secara keseluruhan.</p> <p><u>Rumus Perhitungan :</u></p> $\text{IKLH Prov} = \frac{\text{IPA} + \text{ISPU} + \text{ITH}}{3}$ <p>IKLH_Provinsi = indeks kualitas lingkungan ti</p> <p>ISPU = indeks standar pencemar udara</p> <p>ITH = indeks tutupan hutan</p>	BLHD	BLHD

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

H. SAHBIRIN NOOR